



Rencana Strategis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2020 - 2024

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan

**BKKPN
KUPANG** WBK
WBBM
MENUJU ZONA INTEGRITAS

 [bkkpn.kupang](https://www.instagram.com/bkkpn.kupang)

 [BKKPN Kupang](https://www.facebook.com/BKKPN.Kupang)

 [@bkkpn_kupang](https://twitter.com/bkkpn_kupang)

 kkp.go.id/djprl/bkkpnkupang



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan hikmat serta hidayah-Nya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan. Dokumen Renstra BKKPN Kupang 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pengelolaan kawasan konservasi 5 (lima) tahunan yang disusun dalam rangka menjabarkan informasi tentang Perencanaan Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program dalam jangka waktu 5 tahun sejak Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Renstra BKKPN Kupang 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang, selain itu juga diharapkan dapat menjadi acuan pengelolaan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen Renstra BKKPN Kupang 2020- 2024 merupakan dasar dalam pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Harapan kami semoga Dokumen Renstra BKKPN Kupang 2020-2024 dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BKKPN Kupang. Selanjutnya diharapkan melalui Renstra ini dapat terwujud pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan optimal. Atas perhatian dan bantuan semua pihak diucapkan terima kasih

Kupang, 28 Desember 2021

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



[Handwritten Signature]
Imam Fauzi

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi dan Permasalahan	10
D. Lingkungan Strategis	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	24
A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan	24
B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan	24
C. Tujuan	25
D. Sasaran.....	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	27
A. Arah Kebijakan Ditjen PRL.....	27
B. Strategi Pelaksanaan	27
C. Kerangka Kelembagaan.....	29
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	33
A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024	33
B. Kerangka Pendanaan.....	- 37 -
BAB V PENUTUP	43

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020–2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020. Selanjutnya Renstra tersebut dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024.

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kawasan konservasi perairan nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk menyelaraskan program dan kegiatan kawasan konservasi perairan dengan cita-cita serta tujuan DJPRL, KKP, dan Pemerintah Republik Indonesia, BKKPN Kupang menyusun Rencana Strategis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Tahun 2020–2024. Renstra BKKPN Kupang Tahun 2020–2024 menjadi dasar dan arah penyusunan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan di lingkup BKKPN Kupang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian visi dan misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun ke depan.

B. Kondisi Umum

Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sumber daya ikan dan/atau situs budaya tradisional. Ruang lingkup pengaturan pengelolaan kawasan konservasi meliputi perencanaan, penetapan, pemanfaatan, evaluasi, dan pendanaan kawasan konservasi. Penetapan kawasan konservasi terbagi ke dalam tiga kategori diantaranya adalah Taman (Taman Pesisir, Taman

Pulau Kecil, Taman Nasional Perairan, dan Taman Wisata Perairan), Suaka (Suaka Pesisir, Suaka Pulau Kecil, Suaka Alam Perairan, dan Suakan Perikanan), dan Kawasan Konservasi Maritim (Daerah Perlindungan Adat Maritim, dan Daerah Perlindungan Budaya Maritim).

Kawasan konservasi perairan memiliki kontribusi terhadap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), yaitu dengan memberikan perlindungan khusus serta upaya pelestarian terhadap sumberdaya perikanan di dalam kawasan. Selain itu kawasan konservasi memberikan kontribusi dalam menunjang program pariwisata bahari nasional, sehingga memiliki peran dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta pendapatan negara. Sehingga pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat berdampak bagi kelestarian sumberdaya kawasan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya.

Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan tersebut bersifat terbatas dan harus mengutamakan kelestarian dan memperhatikan daya dukung kawasan. Sehingga upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaat kawasan yang dapat terukur dan efektif.

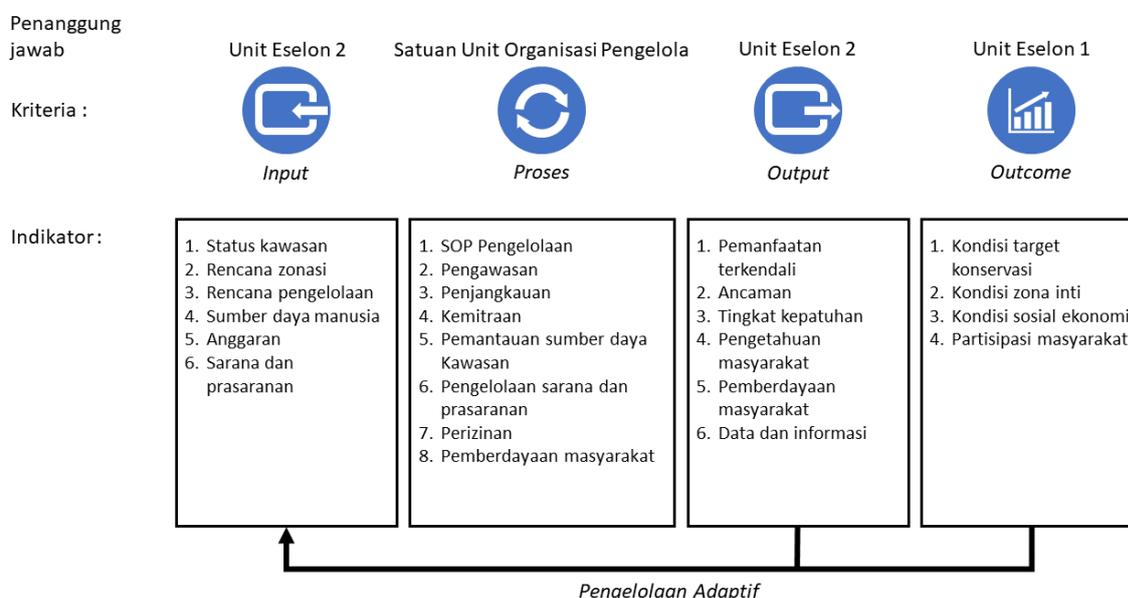
Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diukur melalui alat evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2012 dikembangkan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) melalui Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tabel 1. Status EKKP3K BKKPN Kupang sampai dengan Tahun 2019

No.	Kawasan	Status EKKP3K				
		Merah	Kuning	Hijau	Biru	Emas
1.	Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu	100%	100%	100%	68%	-
2.	Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang	100%	100%	100%	56%	-
3.	Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra	100%	100%	100%	63%	-
4.	Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda	100%	100%	100%	47%	-
5.	Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido	100%	100%	100%	49%	-
6.	Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat	100%	100%	100%	67%	-
7.	Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Waigebo Barat	100%	100%	100%	68%	-
8.	Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Tenggara	100%	100%	100%	54%	-
Ket.		Inisiasi KKPN	Pembentukan KKPN	Pengelolaan Minimum	Pengelolaan Optimum	KKPN Mandiri

Namun demikian pengukuran EKKP3K dipandang belum dapat menjawab kondisi sesungguhnya di lapangan. Selanjutnya pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mengembangkan

EKKP3K menjadi Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang menunjukkan peran dari masing-masing pemangku kepentingan untuk memastikan input, proses, hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) dari pengelolaan kawasan konservasi sebagai bagian dalam pengukurannya. Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*. Adapun kriteria dan indikator dalam pengukuran efektivitas pengelolaan kawasan konservasi disampaikan pada skema dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi

Tabel 2. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Berkelanjutan	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih

			diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan.
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

BKKPN Kupang sebagai UPT Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) DJPRL KKP memiliki otoritas dalam pengelolaan 8 (delapan) KKPN di Indonesia Timur meliputi Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 3.355.352,82 Ha, Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 50.000 Ha, TWP Gili Meno – Gili Ayer – Gili Trawangan (Gili Matra) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 2.954 Ha, TWP Laut Banda di Provinsi Maluku dengan luas 2.500 Ha, TWP Kepulauan Padaido di Provinsi Papua dengan luas 183.000 Ha, Suaka Alam Perairan (SAP) Aru Bagian Tenggara dengan luas 114.000 Ha, SAP Kepulauan Raja Ampat dan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat di Provinsi Papua Barat dengan luas masing-masing 60.000 Ha dan 271.630 Ha.

Selama lima tahun terakhir BKKPN Kupang telah melakukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan melalui kegiatan teknis pengelolaan kawasan konservasi diantaranya adalah survei kondisi habitat dan ekosistem kawasan, survei biota laut dilindungi, survei sosial ekonomi masyarakat di dalam kawasan, pendataan morfometrik dan TKG pada komoditi ikan ekonomis penting di dalam kawasan, pemantauan zonasi, pengendalian terhadap izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan, rehabilitasi ekosistem, *quick response* penanganan biota laut dilindungi,

pelayanan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan, peningkatan penyadartahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar kawasan, kemitraan/kerja sama untuk mendukung konservasi, dan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK). Data capaian kegiatan dijabarkan pada penjelasan berikut:

- 1) Selama lima tahun terakhir BKKPN Kupang telah berkomitmen dan berperan aktif dalam penanganan biota laut dilindungi. Sampai dengan tahun 2020 BKKPN Kupang telah menangani sebanyak 78 kasus mamalia laut terdampar, mengamankan sebanyak 9.752 telur penyu dari penyu yang melakukan pendaratan untuk bertelur serta melepasliarkan sebanyak 7.395 tukik yang menetas.
- 2) BKKPN Kupang selama periode 2015–2020 telah menangani sebanyak 2.523 kasus pelanggaran di dalam kawasan. Jenis pelanggaran terdiri dari penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (peledak, potasium, dsb.), pelanggaran zonasi, hingga penambangan pasir.
- 3) BKKPN Kupang telah menjalin kemitraan dan menginisiasi pembentukan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK). Sampai dengan tahun 2020 BKKPN Kupang telah memberikan bantuan kepada 25 kelompok masyarakat yang bergerak dalam berbagai aktivitas di dalam kawasan diantaranya adalah pariwisata, pengawasan, penangkapan ikan, dan pembudidaya ikan di dalam kawasan.
- 4) Pelayanan publik BKKPN Kupang meliputi pelayanan terhadap penerbitan karcis masuk pariwisata alam perairan, tanda masuk kegiatan pendidikan, tanda masuk kegiatan penelitian, tanda daftar kegiatan penangkapan ikan, dan tanda daftar kegiatan pembudidaya ikan kecil. Hingga tahun 2020, BKKPN Kupang telah menerbitkan sebanyak 35.737 karcis masuk yang terdiri dari 1.084 wisatawan domestik dan 34.695 wisatawan mancanegara, 94 tanda masuk untuk kegiatan pendidikan, 84 tanda masuk untuk kegiatan penelitian yang terdiri dari 77 peneliti dalam negeri dan 7 peneliti dari

mancanegara. Selanjutnya telah diterbitkan sebanyak 232 tanda daftar kegiatan penangkapan ikan untuk nelayan kecil yang beroperasi di dalam kawasan.

- 5) Total nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diperoleh BKKPN Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp 3.532.910.000,-

Secara garis besar target Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKPN Kupang telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik. Capaian Indikator Kinerja BKKPN Kupang hingga tahun 2020 antara lain:

- a. Jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya sebanyak 8 kawasan;
- a. Kawasan Konservasi Perairan Nasional di wilayah Kerja BKKPN Kupang yang operasional dan dimanfaatkan seluas 4.039.436 Hektar;
- b. Jumlah kemitraan dan kerjasama dengan kelompok masyarakat yang mendukung pengelolaan efektif kawasan konservasi dan/atau keanekaragaman hayati sebanyak 28 kelompok masyarakat;
- c. Persentase unit kerja BKKPN Kupang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar 100%;
- d. Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang;
- e. Nilai WBK BKKPN Kupang 88,60;
- f. Nilai kinerja anggaran BKKPN Kupang meningkat dari 77.74% menjadi 99.36%;
- g. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BKKPN Kupang sebesar 100%.

BKKPN Kupang telah menerima penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas prestasi memperoleh predikat sebagai unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020. Selanjutnya juga berperan aktif dalam program perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam skala nasional maupun internasional. Program tersebut diantaranya *Coral Reef Rehabilitation and*

Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI), dan Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA).

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati laut yang tinggi dengan ekosistem pesisir yang dapat menyediakan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dan sekitarnya. Sebagai bagian dari segitiga terumbu karang (*Coral Triangle*) dunia, wilayah Indonesia Timur mempunyai keanekaragaman terumbu karang paling kaya di Bumi. Melihat potensi tersebut Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen penuh mendukung *Regional Plan of Action Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*, utamanya terkait dengan upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif (*Marine Protected Areas (MPAs) Established and Effectively Managed and therefore (CTMPAS) in place and fully functional*).

Luasan kawasan konservasi terus berkembang dalam 12 tahun terakhir. Pada tahun 2006 Indonesia baru mempunyai 7 juta Ha kawasan konservasi dan tahun 2019 sudah mempunyai 23,14 juta Ha. Capaian kawasan konservasi ini sudah memenuhi 7,12% dari target Pemerintah Indonesia yang menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta Ha atau sebesar 10% luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target tersebut sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity/CBD*)–*Aichi Target 11*, dan *Sustainable Development Goal 14*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta hektare pada tahun 2024. Secara khusus diharapkan pada tahun 2024, seluas 20 juta hektar kawasan konservasi dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

BKKPN Kupang mengelola 4,04 juta Ha atau sekitar 17,46% dari total luas kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia saat ini. Kawasan konservasi yang tersebar di wilayah Indonesia timur ini

menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Data series biofisik kawasan pada tahun 2020 meliputi ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem hutan mangrove sebagai berikut:

Tabel 3. Ekosistem Terumbu Karang

No.	Kawasan	Luas Terumbu Karang (Ha)	Persentase Tutupan (%)
1.	TNP Laut Sawu	15,555.9	23.93
2.	TWP Kep. Kapoposang	2,460.03	36.60
3.	TWP Gili Matra	186.56	36.24
4.	TWP Laut Banda	90.53	56.92
5.	TWP Kep. Padaido	1,617.93	28.46
6.	SAP Kep. Raja Ampat	658.96	64.22
7.	SAP Kep. Waigeo Barat	779.240	55.89
8.	SAP Kep. Aru Tenggara	16,170.28	24.13

Tabel 4. Ekosistem Padang Lamun

No.	Kawasan	Luas Padang Lamun (Ha)	Persentase Tutupan (%)
1.	TNP Laut Sawu	8078.81	38.30
2.	TWP Kep. Kapoposang	328.54	30.58
3.	TWP Gili Matra	132.66	44.12
4.	TWP Laut Banda	137.83	48.42

No.	Kawasan	Luas Padang Lamun (Ha)	Persentase Tutupan (%)
5.	TWP Kep. Padaido	989.61	28.88
6.	SAP Kep. Raja Ampat	344.93	31.51
7.	SAP Kep. Waigeo Barat	-	-
8.	SAP Kep. Aru Tenggara	2,868.04	44.91

Tabel 5. Ekosistem Hutan Mangrove

No.	Kawasan	Luas Hutan Mangrove (Ha)	Persentase Tutupan (%)
1.	TNP Laut Sawu	3,577.45	78.05
2.	TWP Kep. Kapoposang	-	-
3.	TWP Gili Matra	4.32	70.37
4.	TWP Laut Banda	-	-
5.	TWP Kep. Padaido	7.45	79.62
6.	SAP Kep. Raja Ampat	940.52	78.29
7.	SAP Kep. Waigeo Barat	9.70	71.82
8.	SAP Kep. Aru Tenggara	296.48	71.05

Terdapat beberapa jenis biota laut dilindungi yang ditemukan keberadaannya di dalam kawasan yang dikelola oleh BKKPN Kupang, diantaranya adalah:

Tabel 6. Data Kemunculan Biota Laut Dilindungi

No.	Jenis Biota	Spesies	Nama Indonesia
1.	Setasea/Mamalia Laut	1. <i>Physeter macrocephalus</i>	1. Paus sperma
		2. <i>Kogia sima</i>	2. Paus sperma cebol
		3. <i>Kogia breviceps</i>	3. Paus sperma kerdil
		4. <i>Globicephala macrorhyncus</i>	4. Paus pemandu sirip pendek
		5. <i>Orcinus orca</i>	5. Paus pembunuh
		6. <i>Pseudorca crassidens</i>	6. Paus pembunuh palsu
		7. <i>Feresa attenuata</i>	7. Paus pembunuh kerdil
		8. <i>Peponocephala electra</i>	8. Paus kepala semangka
		9. <i>Mesoplodon spp.</i>	9. -
		10. <i>Ziphius cavirostris</i>	10. Paus paruh cuvier
		11. <i>Balaenoptera brydei</i>	11. Paus bryde
		12. <i>Balaenoptera edeni</i>	12. Paus bryde kecil
		13. <i>Balaenoptera musculus</i>	13. Paus biru
		14. <i>Megaptera novaeangliae</i>	14. Paus bongkok
		15. <i>Stenella longirostris</i>	15. Lumba lumba paruh panjang (<i>spinner</i>)
		16. <i>Stenella attenuate</i>	16. Lumba lumba totol (<i>spotted</i>)
		17. <i>Steno bredanensis</i>	17. Lumba lumba gigi kasar
		18. <i>Grampus griseus</i>	18. Lumba lumba hidung botol (<i>bottlenose</i>)

No.	Jenis Biota	Spesies	Nama Indonesia
		19. <i>Tursiops truncates</i>	19. Lumba lumba fraser
		20. <i>Lagenodelphis hosei</i>	20. -
		21. <i>Dugong dugong</i>	21. Dugong
2.	Reptil/Penyu	1. <i>Chelonia mydas</i> 2. <i>Eretmochelys imbricata</i> 3. <i>Lepidochelys olivacea</i> 4. <i>Dermochelys coriacea</i> 5. <i>Natator depressus</i> 6. <i>Caretta caretta</i>	1. Penyu hijau 2. Penyu sisik 3. Penyu lekang 4. Penyu belimbing 5. Penyu pipih 6. Penyu tempayan
3.	Ikan	1. <i>Rhincodon typus</i> 2. <i>Manta alfredi</i> 3. <i>Manta birostris</i> 4. <i>Cheilinus undulatus</i>	1. Hiu paus 2. Pari manta (karang) 3. Pari manta (oseanik) 4. Ikan napoleon
4.	Mollusca	1. <i>Tridacna sp.</i> 2. <i>Hippopus sp.</i>	1. Kima 2. Kima

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam kawasan meliputi data rumah tangga perikanan dan perusahaan pariwisata alam perairan, serta nilai ekonomi masyarakat melalui aktivitas pemanfaatan kawasan. Berikut informasi data RTP dan Pengusaha PAP di dealapan kawasan selama lima tahun terakhir.

Tabel 7. Data RTP dan Pengusaha PAP

No.	Kawasan	RTP		Unit Penangkapan	Pengusaha PAP
		Nelayan	Pembudidaya		
1.	TNP Laut Sawu	6,343	3,578	7,046	-
2.	TWP Kepulauan Kapoposang	374	-	374	2
3.	TWP Gili Matra	172	-	90	48
4.	TWP Laut Banda	638	1	638	-
5.	TWP Kepulauan Padaido	1,221	-	1,221	1
6.	SAP Kepulauan Raja Ampat	304	-	304	-
7.	SAP Kepulauan Waigeo Barat	181	-	181	3
8.	SAP Kepulauan Aru Tenggara	225	-	225	-

BKKPN Kupang mengelola 4.039.436 Hektar dengan 8 KKPN, informasi potensi 8 KKPN yang dikelola oleh BKKPN antara lain:

1) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu

TNP Laut Sawu ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan

Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. TNP Laut Sawu memiliki luas 3.355.352,82 Ha yang terdiri dari wilayah perairan Selat Sumba dan sekitarnya seluas 557.837,40 Ha dan wilayah perairan Pulau Timor-Rote-Sabu-Batek dan sekitarnya seluas 2.797.512,42 Ha. Ekosistem pesisir utama TNP Laut Sawu terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 15.555,90 Ha, ekosistem padang lamun seluas 8.078,81 Ha, dan ekosistem mangrove seluas 3.577,45 Ha. Potensi wisata alam perairan terdiri dari 27 spot *diving* dan *snorkling*, 4 lokasi *whale watching*, 12 lokasi *sport fishing*, dan 2 lokasi *surfing*. Potensi nilai tangkapan mencapai 45.662,13 ton pertahun. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak 6.343 dengan armada penangkapan sebanyak 7.046 unit, sementara untuk pembudidaya sebanyak 3.578 dengan luas area budidaya rumput laut seluas 3.555 Ha, budidaya mutiara seluas 137.830,49 Ha, dan budidaya ikan dengan keramba jaring apung seluas 59.276,83 Ha. TNP Laut Sawu menjadi rumah bagi biota laut yang terancam punah dan dilindungi, hingga tahun 2020 ditemukan sebanyak 26 jenis mamalia laut, 6 jenis penyu, dan 6 jenis ikan yang dilindungi.

2) Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang

TWP Kepulauan Kapoposang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan. TWP Kep. Kapoposang memiliki luas 50.000 Ha yang di dalamnya terdapat 3 pulau berpenghuni diantaranya Pulau Kapoposang (luas ± 42 Ha), Pulau Papandangan (luas ± 13 Ha), dan Pulau Gondongbali (luas ± 15 Ha), dan 3 pulau tidak berpenghuni yaitu Pulau Tambakulu (luas ± 5 Ha), Pulau Pamanggangan (luas ± 5 Ha), dan Pulau Suranti (luas ± 4 Ha). Ekosistem pesisir utama TWP Kepulauan Kapoposang terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 2.460,03 Ha, dan ekosistem

padang lamun seluas 328,54 Ha. Potensi wisata alam perairan terdiri dari 13 spot *diving* dan 1 lokasi *sport fishing*, dan 2 lokasi *surving*. TWP Kapoposang memiliki terumbu karang dengan kontur curam (*drop off*), atau melintang secara vertikal membentuk sebuah dinding yang menjadikannya sebagai spot selam terbaik di Kepulauan Spermonde. TWP Kepulauan Kapoposang memiliki sebanyak 183 spesies dari 262 spesies karang (69,8%) dari spesies karang teridentifikasi di kawasan Kepulauan Spermonde. Potensi nilai tangkapan mencapai 1.234,63 ton pertahun. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak 374 dengan armada penangkapan sebanyak 374, alat penangkapan ikan sebanyak 16 jenis dengan 10 jenis komoditas ikan yang menjadi target penangkapan. TWP Kepulauan Kapoposang menjadi rumah bagi biota laut yang terancam punah dan dilindungi, hingga tahun 2020 ditemukan sebanyak 2 jenis mamalia laut, 3 jenis penyu, dan 2 jenis ikan yang dilindungi.

3) Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra

TWP Gili Matra ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. TWP Gili Matra memiliki luas 2.954 Ha. Ekosistem pesisir utama TWP Gili Matra terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 186,56 Ha, ekosistem padang lamun seluas 132,66 Ha, dan ekosistem mangrove seluas 4,326 Ha. Potensi wisata alam perairan terdiri dari 42 spot *diving* dan *snorkling*, dan 1 lokasi *surving*. Potensi nilai tangkapan mencapai 72,94 ton pertahun. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak 172 dengan armada penangkapan sebanyak 90 unit, sementara untuk pelaku pengusaha pariwisata alam perairan sebanyak 48. Berdasarkan data kunjungan kawasan TWP Gili Matra, hingga 2020 tercatat sebanyak 35.143 pengunjung,

dengan nilai PNBK hingga tahun 2020 mencapai Rp3.480.395.000,., TWP Gili Matra menjadi rumah bagi biota laut yang terancam punah dan dilindungi, hingga tahun 2020 ditemukan sebanyak 3 jenis penyu, dan 2 jenis ikan yang dilindungi.

4) Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda

TWP Laut Banda ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku. TWP Laut Banda memiliki luas 2.500 Ha dengan ekosistem pesisir utama terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 90,53 Ha, dan ekosistem padang lamun seluas 137,83 Ha. Potensi wisata alam perairan terdiri dari 16 spot *diving* dan *snorkling*, 1 lokasi *whale watching*, dan 1 lokasi *sport fishing*. Potensi nilai tangkapan mencapai 30,06 ton pertahun. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak 638 dengan armada penangkapan sebanyak 638 unit. TWP Laut Banda menjadi rumah bagi biota laut yang terancam punah dan dilindungi, hingga tahun 2020 ditemukan sebanyak 16 jenis mamalia laut, 3 jenis penyu, dan 3 jenis ikan yang dilindungi.

5) Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido

TWP Kep. Padaido ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua. TWP Kepulauan Padaido memiliki luas 183.000 Ha dengan ekosistem pesisir utama yang terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 1.617,93 Ha, ekosistem padang lamun seluas 989,61 Ha, dan ekosistem mangrove seluas 7,45 Ha. Potensi wisata alam perairan terdiri dari 21 spot *diving* dan *snorkling*. Potensi nilai tangkapan mencapai 3.042,08 ton pertahun. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak

1.221 dengan armada penangkapan sebanyak 1.221 unit. TWP Kepulauan Padaido menjadi rumah bagi biota laut yang terancam punah dan dilindungi, hingga tahun 2020 ditemukan sebanyak 5 jenis mamalia laut, 3 jenis penyu, dan 2 jenis ikan yang dilindungi.

6) Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat

SAP Kepulauan Raja Ampat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.64/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. SAP Kepulauan Raja Ampat memiliki luas 60.000 Ha dengan ekosistem pesisir utama yang terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 658,96 Ha, ekosistem padang lamun seluas 344,93 Ha, dan ekosistem mangrove seluas 940,52 Ha. Potensi nilai tangkapan mencapai 1.573 ton pertahun. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak 304 dengan armada penangkapan sebanyak 304 unit. SAP Kep. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut yang terancam punah dan dilindungi, hingga tahun 2020 ditemukan sebanyak 16 jenis mamalia laut, 2 jenis penyu, dan 3 jenis ikan yang dilindungi.

7) Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat memiliki luas 271.630 Ha dengan ekosistem pesisir utama yang terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 779,240 Ha, dan ekosistem mangrove seluas 9,70 Ha. Potensi nilai tangkapan mencapai 7.118,98 ton pertahun. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak 181 dengan armada penangkapan sebanyak 181 unit. SAP

Kepulauan Waigeo Sebelah Barat menjadi rumah bagi biota laut yang terancam punah dan dilindungi antara lain Pari Manta dan Penyu Hijau.

- 8) Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara
SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku. SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara memiliki luas 114.000 Ha dengan ekosistem pesisir utama yang terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 16.170,28 Ha, ekosistem padang lamun seluas 2.868,04 Ha, dan ekosistem mangrove seluas 296,48 Ha. Potensi nilai tangkapan mencapai 6.377,66 ton pertahun. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak 225 dengan armada penangkapan sebanyak 225 unit. SAP Kep. Aru Bagian Tenggara menjadi rumah bagi biota laut yang terancam punah dan dilindungi, hingga tahun 2020 ditemukan sebanyak 3 jenis mamalia laut, 2 jenis penyu, dan 2 jenis ikan yang dilindungi.

2. Permasalahan

Pada saat ini, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut diantaranya merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, upaya dalam meningkatkan pengelolaan kawasan yang efektif dan optimal, serta amanat yang berasal dari kebijakan pusat atau nasional. Berbagai tantangan tersebut diantaranya:

- 1) Belum efektifnya pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang.

Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian, tetapi juga menekankan manfaat kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan bagi

kesejahteraan masyarakat. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi sangat penting karena selain memberikan manfaat bagi kelestarian dan keberlanjutan kawasan, pengelolaan kawasan konservasi perairan juga harus bermanfaat bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif erat kaitannya dengan bagaimana membangun sebuah pengelolaan kawasan yang akuntabel, mandiri dan berkelanjutan, sehingga tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya dapat terkelola dan terjaga dengan baik.

Selain itu, upaya penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Gili Meno, Gili Ayer dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 58/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku, Nomor 59/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 60/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, Nomor 62/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kep. Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua, Nomor 63/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, dan Nomor 64/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku, akan dilakukan sebagai dasar pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.

- 2) Belum optimalnya peran aktif masyarakat sekitar di kawasan konservasi perairan nasional lingkup wilayah kerja BKKPN Kupang.

Aktivitas penangkapan ikan di dalam kawasan oleh masyarakat dengan tidak ramah lingkungan masih dilakukan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi. Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat berdampak buruk dan menyebabkan kerusakan ekosistem di dalam kawasan. Upaya pemantauan terhadap aktivitas yang merusak yang dilakukan oleh pengelola masih terbatas dikarenakan luasnya area yang dipantau serta keterbatasan sumber daya pengelola. Berdasarkan kenyataan tersebut, peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi dianggap penting dan dibutuhkan dengan menerapkan model pengelolaan kolaboratif yang memungkinkan para pemangku kepentingan berperan dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi.

- 3) Pengendalian dan pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang belum terkelola dan terdata dengan baik.

Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditjen PRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>. BKKPN Kupang akan berkontribusi terhadap pendataan dan verifikasi pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional yang ada di wilayah kerja melalui monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana zonasi.

- 4) Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BKKPN Kupang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Lingkungan Strategis

Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Pada tahun 2020-2024, pengelolaan kawasan konservasi dipengaruhi oleh lingkungan internal diantaranya adalah perencanaan ruang laut, evaluasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta tata kelola pemerintahan di lingkungan BKKPN Kupang.

Untuk lingkungan eksternal diantaranya adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kawasan konservasi, adanya konflik kepentingan pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang belum optimal, kerusakan wilayah pesisir dan rentannya ekosistem perairan laut, serta pencemaran laut (*marine debris*).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Dengan demikian Visi BKKPN Kupang tahun 2020-2024 adalah “Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Menuju Terwujudnya Visi DJPRL”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden empat dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;

2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BKKPN Kupang, maka ditetapkan Misi BKKPN Kupang yaitu:

1. Perencanaan ruang laut di wilayah kerja BKKPN Kupang;
2. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BKKPN Kupang;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup BKKPN Kupang.

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BKKPN Kupang merumuskan tujuan Kawasan Konservasi Perairan Nasional 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi perencanaan ruang laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan pengendalian pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang;
2. Misi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

- dengan tujuan meningkatkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang;
3. Misi peningkatan tata kelola pemerintahan di BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BKKPN Kupang.

D. Sasaran

Sasaran pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BKKPN Kupang dari hasil pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup dan program dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BKKPN Kupang Tahun 2020 – 2024 dijabarkan sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Tujuan meningkatkan pengendalian pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang;

II. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan meningkatkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan sasaran kegiatan:

- a. meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang;
- b. meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang;

III. Program Dukungan Manajemen

Tujuan meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BKKPN Kupang dengan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di BKKPN Kupang.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Ditjen PRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, salah satunya adalah “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”. Ditjen PRL sebagai salah satu unit eselon I Lingkup KKP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2020 - 2024 yang memerlukan dukungan BKKPN Kupang yaitu:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2. Pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
3. Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

B. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - b. dukungan operasionalisasi KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BKKPN Kupang;
 - c. pengelolaan data KKPRL di wilayah kerja BKKPN Kupang.

2. Pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan melalui:

- d. penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- e. peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pengelola kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- f. penyediaan data series kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- g. monitoring implementasi zonasi kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- h. penyadartahuan masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya kawasan konservasi perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- i. penyusunan daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan dalam kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- j. fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/ adat/ tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/ bimbingan teknis, bantuan konservasi) di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- k. pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- l. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- m. inisiasi dan pelaksanaan jejaring dan kemitraan konservasi Kawasan di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- n. pelaksanaan tata Kelola pendaanaan berkelanjutan Kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- o. pemberian bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BKKPN Kupang

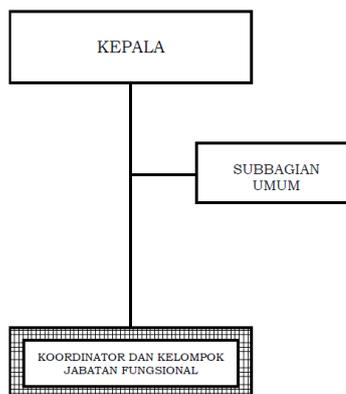
- p. monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK di wilayah kerja BKKPN Kupang
3. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BKKPN Kupang melalui:
- a. pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di BKKPN Kupang;
 - b. penguatan Akuntabilitas Kinerja di BKKPN Kupang;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik di BKKPN Kupang;
 - d. pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di BKKPN Kupang.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, struktur organisasi BKKPN Kupang, sebagaimana berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG



Gambar 2. Struktur Organisasi BKKPN Kupang

Struktur organisasi BKKPN Kupang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 terdiri dari Kepala, Sub-bagian Umum, serta Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional yang terdapat di dalam struktur BKKPN Kupang diantaranya adalah:

1. Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya;
2. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda;
3. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama;
4. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir; dan
5. Penata Laksana Barang Terampil.

Letak kekuatan organisasi dipengaruhi oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Total SDM yang dimiliki BKKPN Kupang sampai untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) pegawai. Secara detail data pegawai BKKPN Kupang disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Kekuatan SDM BKKPN Kupang

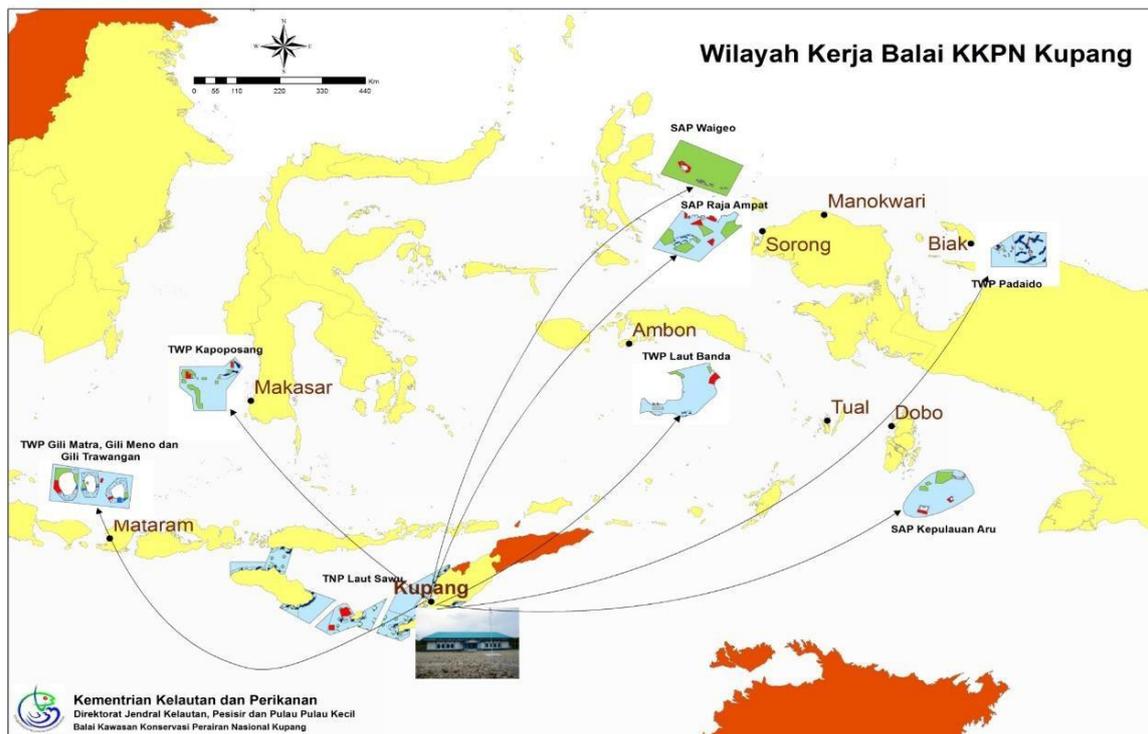
No.	Jabatan	Jumlah	Ket.
PNS			
1.	Kepala Balai	1	Struktural
2.	Kasubbag Tata Usaha / Umum /Analis Pengelola Keuangan APBN, Ahli Madya	1	Struktural / Fungsional
3.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	3	Fungsional

4.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	21	Fungsional
5.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	Fungsional
6.	Penata Laksana Barang Terampil	1	Fungsional
7.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga	1	Umum
8.	Analisis Keuangan	1	Umum
9.	Pengadministrasian Umum	2	Umum
10.	Analisis Tata Laksana	1	Umum
11.	Analisis Perencanaan	1	Umum
12.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2	Umum
13.	Analisis Konservasi Kawasan	14	Umum
14.	Analisis Kelautan Dan Perikanan	6	Umum
Total		56	
Non PNS			
1.	Tenaga Pelayanan	6	-
2.	Tenaga Teknis / Lapangan / Enumerator	21	-
3.	Security	9	-
4.	Supir	2	-
5.	Cleaning service	7	-
6.	Kapten Kapal	1	-

7.	ABK	11	-
8.	Pramubakti / administrasi lainnya	7	-
Total		64	

Penataan kelembagaan BKKPN Kupang akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, penataan kelembagaan BKKPN Kupang serta penguatan kapasitas SDM merupakan penyesuaian dan turunan langsung dari kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Wilayah kerja BKKPN Kupang adalah seperti pada peta dan gambar di bawah ini.



Gambar 3. Peta Sebaran Wilayah Kerja BKKPN Kupang

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Ditjen PRL, maka BKKPN Kupang telah menyusun kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan BKKPN Kupang 2020–2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BKKPN Kupang 2020 – 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1	Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang operasional dan dimanfaatkan (ha)	4.039.436	-	-	-	-
		2	Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	-	5	5	5	5
2	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2	4	2	4	4
		4	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	2	7	1	4	4

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
1	Meningkatnya penataan ruang laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPR di wilayah kerja BKKPN Kupang (dokumen)	-	-	1	1	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
1	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKKPN Kupang	1	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	-	72,5	73,5	74,5	75,5
		2	Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang (indeks)	72	73	74	75	76
		3	Nilai WBK BKKPN Kupang (Nilai)	76	76	76	76	76
		4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BKKPN Kupang (%)	90	91	92	93	94
		5	Persentase unit kerja BKKPN Kupang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		6	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BKKPN Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	65	70	75	80
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang (Nilai)	88	89	89	90	90

		8	Nilai Kinerja Anggaran BKKPN Kupang (Nilai)	85	86	87	88	89
		9	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BKKPN Kupang (%)	100	100	100	100	100

B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan kawasan konservasi, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Kerangka indikasi pendanaan BKKPN Kupang Tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp 173,475 miliar. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis BKKPN Kupang.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan BKKPN Kupang Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

MATRIK KERANGKA PENDANAAN

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG TAHUN 2020-2024

Progam/ Kegiatan	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Target					Alokasi Pendanaan (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020- 2024 (Rp. Miliar)
Total BKKPN Kupang							39,200	26,320	32,295	37,330	38,330	173,475
Program Kualitas Lingkungan Hidup							28,200	14,320	19,895	22,930	23,930	109,275
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut							28,200	14,320	19,895	22,930	23,930	109,275
	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan di wilayah kerja BKKPN Kupang						27,450	13,390	19,520	22,000	23,000	105,360
	Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang operasional dan dimanfaatkan (ha)	4.039.436	-	-	-	-						
	Persentase nilai efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	-	5	5	5	5						

Progam/ Kegiatan	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Target					Alokasi Pendanaan (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020- 2024 (Rp. Miliar)
	Nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang (%)											
	Meningkatnya jejaring, kemitraan/Kerjasama dan konvensi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BKKPN Kupang						0,750	0,930	0,375	0,930	0,930	3,915
	a. Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang (kesepakatan)	2	4	2	4	4						
	b. Kesepakatan jejaring, kemitraan/Kerjasama dan konvensi dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BKKPN Kupang (kelompok)	2	7	1	4	4						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							-	-	0,400	0,400	0,400	1,200
Program Perencanaan Ruang Laut							-	-	0,400	0,400	0,400	1,200

Progam/ Kegiatan	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Target					Alokasi Pendanaan (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020- 2024 (Rp. Miliar)
	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BKKPN Kupang						-	-	0,400	0,400	0,400	1,200
	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL di wilayah kerja BKKPN Kupang (dokumen)	-	-	1	1	1						
Program Dukungan Manajemen							11,000	12,000	12,000	14,000	14,000	63,000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							11,000	12,000	12,000	14,000	14,000	63,000
	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKKPN Kupang						11,000	12,000	12,000	14,000	14,000	63,000
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah BKKPN Kupang (%)	-	72,5	75	77,5	80						

Progam/ Kegiatan	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Target					Alokasi Pendanaan (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020- 2024 (Rp. Miliar)
	Indeks profesionalitas ASN BKKPN Kupang (indeks)	72	73	74	75	76						
	Nilai WBK BKKPN Kupang (nilai)	76	76	76	76	76						
	Nilai rekonsiliasi kinerja BKKPN Kupang (nilai)	90	91	92	93	94						
	Persentase unit kerja BKKPN Kupang Yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BKKPN Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	65	70	75	80						
	Nilai IKPA BKKPN Kupang (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai kinerja anggaran BKKPN Kupang (nilai)	85	86	87	88	89						

Progam/ Kegiatan	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Target					Alokasi Pendanaan (Rp. Miliar)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BKKPN Kupang (%)	100	100	100	100	100							
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/overhead lingkup BKKPN Kupang (%)	100	100	100	100	100							
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup BKKPN Kupang (bulan)	12	12	12	12	12							

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungkn sector terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.